

**RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA (KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK  
MASYARAKAT SAMBI RAMPAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar sarjana  
Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh**

**ALMULYADI  
10538281413**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Almulyadi, NIM 10538281413** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 173 Tahun 1439 H/2017 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017.

24 Rabiul Awal 1439 H  
Makassar, -----  
13 Desember 2017 M

### PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si.

2. Muhajir, S.Pd., M.Pd.

3. Andi Adam, S.Pd., M.Pd.

4. Sitti Asnaeni AM, S.Sos., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 874

Ketua Prodi  
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.  
NBM: 951 829

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Relasi Penguasa dan Pengusaha (Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur).

Nama : Almulyadi

Nim : 10538281413

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Desember 2017

Disahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

  
Andi Adam, S.Pd., M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Prodi  
Pendidikan Sosiologi

  
Erwin Agus S.Pd., M.Pd., Ph.D  
NBM: 866 934

  
Dr. H. Nursalam, M.Si  
NBM: 951 829

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Memulai dengan penuh keyakinan*

*Menjalankan dengan penuh keikhlasan*

*Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)*

***KU PERSEMBAHKAN....***

***“KARYA SEDERHANA INI SEBAGAI TANDA BUKTI KU KEPADA KEDUA  
ORANG TUAKU SERTA SELURUH KELUARGA TERCINTA YANG  
SENANTIASA MENYAYANGIKU, BERDOA DENGAN TULUS DAN  
IKHLAS DAN SELALU MEMBERIKAN YANG TERBAIK SERTA SELALU  
MEMBERIKAN MOTIVASI DO’A..,PENGORBANAN..,NASEHAT..,SERTA  
KASIH SAYANG YANG TULUS MENUNJANG KEBERHASILAN KU  
DALAM MENGGAPAI CITA - CITAKU ”***

## ABSTRAK

**Almulyadi. 2017.** Relasi Penguasa dan Pengusaha (Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur). Skripsi. Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Budi Setiawati Dan pembimbing II Andi Adam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Motif Relasi dari Penguasa dan Pengusaha yang dibangun secara spontanitas di Kecamatan Sambu Rampas dan untuk menganalisis dampak dari relasi penguasa dan pengusaha terhadap Masyarakat Kecamatan Sambu Rampas.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penguasa dan Pengusaha di Kecamatan Sambu Rampas . Adapun sampelnya menggunakan teknik *purposive* sampling yaitu teknik mencakup orang – orang yang diseleksi atas dasar kriteria – kriteria tertentu yang dibuat peneliti, berdasarkan tujuan penelitian informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Informan yaitu yang berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu.

Instrument penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi merupakan sumber kredibel dan kompeten dalam menjawab pertanyaan mengenai “Relasi Penguasa Dan Pengusaha (Kajian Sosiologi Politik Dalam Masyarakat Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur)”. Di samping masyarakat juga pihak kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Pola relasi penguasa dan pengusaha di Kecamatan Sambu Rampas merefleksikan timbulnya abnormalitas pada keseluruhan jaringan hubungan antara politik (penguasa) dan perekonomian (pengusaha). Respon Masyarakat atas relasi penguasa dan pengusaha terdapat dua relasi yaitu relasi berbasis kepentingan dan relasi transaksional.

*Kata kunci: relasi, penguasa, pengusaha*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Alhamndulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita tercinta, Muhammad saw yang telah menyinari dunia ini dengan cahaya Islam. Teriring harapan semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafa'at di hari kemudian. Amin.

Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan Proposal ini. Akan tetapi berkat pertolongan-Nya dan bantuan dari berbagai pihak, Proposal ini dapat diselesaikan walaupun tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis menganturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si. pembimbing I dan Andi Adam, S.Pd M.Pd. pembimbing II atas kesediaan dan kerelaan pembimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib, S. Pd. ,M.Pd.,Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Muhammadiyah Makassar, beserta stafnya. Dr. H. Nursalam, M.Si. Ketua Jurusan Pendidikan sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat, Nafi, Rahman, Emil, Erwani, Nurma, yang telah memberikan dukungan ide maupun gagasan dalam penyelesaian proposal ini.

Penulis juga menganturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tersayang Murfia dan Ayahanda Mursin, Atas segala pengorbanan, pengertian, kepercayaan, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kiranya Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua.

Hanya Allah Rabbul Alamin yang dapat memberikan imbalan yang setimpal. Semoga segala aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah disisi-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

**Kesemprnaan Hanya Milik Allah Semata**

Makassar, Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBERAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERJANJIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KARTU KONTROL PEMBIMBING I.....</b>	<b>vi</b>
<b>KARTU KONTROL BIMBINGAN II .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix-x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi-xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii-xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	10



1. Tinjauan Karya Terdahulu .....	10
2. Relasi.....	11
3. Penguasa.....	11
4. Pengusaha.....	13
5. Teori Yang Relevan .....	14
B. Kerangka Pikir .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokus Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian.....	28
D. Fokus Penelitian .....	29
E. Instrument Penelitian .....	29
F. Jenis Dan Sumber Data .....	29
G. Teknik Pengumpulan Data .....	30
H. Teknik Analisis Data .....	31
I. Teknik Keabsahan Data .....	32

### **BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Kecamatan Dan Kondisi Geografis .....	34
B. Sistem Kebudayaan Masyarakat .....	37
C. Sistem Mata Pencaharian .....	37
D. Sistem Kemasyarakatan Dan Kekerabatan .....	38

E. Sistem Religi Atau Kepercayaan .....	38
F. Sistem Bahasa Masyarakat .....	38
G. Sistem Kesenian Masyarakat .....	39
H. Sistem Pengetahuan Masyarakat .....	39

## **BAB V POLA RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA**

A. Pola Relasi Penguasa .....	41
a. Dominasi/kekuasaan .....	41
b. Kepentingan Politik .....	46
B. Pola Relasi Pengusaha .....	49
a. Kebijakan Pengusaha .....	49
b. Taipan .....	52

## **BAB VI RESPON MASYARAKAT ATAS RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA**

A. Dampak Positif .....	54
a. Keterbukaan Lapangan Pekerjaan .....	54
b. Kesejahteraan .....	56
B. Dampak Negatif .....	58
Penindasan/Intimidasi .....	58

**BAB VII SIMPULSN DAN SARAN**

A. Simpulan.....59

B. Saran.....60

**DAFTAR PUSTAKA .....61**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran 1: Surat-Surat Penelitian

- a. Permohonan pengesahan judul skripsi dan penetapan dosen pembimbing
- b. Surat keterangan Perbaikan Hasil Ujian Proposal
- c. Berita acara seminar
- d. Surat izin penelitian
- e. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

### Lampiran 2: Instrumen penelitian

- Pedoman Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kajian historis mengenai akar demokrasi dan kediktatoran, Barington Moore menyimpulkan bahwa “sebuah kelas penduduk kota yang besar dan *independent* telah menjadi elemen sangat diperlukan dalam pengembangan demokrasi”. Menurutnya demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi, begitu argumen Moore. *No bourgeoisie no democracy.*

Dewasa ini banyak pengusaha menyepakati doktrin Moore ini dan bahkan ditandai dengan banyaknya pengusaha berbondong-bondong terjun dalam dunia politik seperti yang dikatakan diatas. Hal ini merupakan trend dari dulu, baik di luar negeri maupun di Indonesia, banyak pengusaha menguasai jabatan publik. kekuasaan politik-birokrasi. Mereka diatur dibawah aparat birokrasi dan biasanya sangat tergantung dengan modal asing. oleh sebab itu mereka hanya sebagai pemain pendukung dibelakang pemerintah.

Pada masa Orde Baru lalu, peran pengusaha hanya sebatas *supporting system* belaka, dari jejaring politik dan ekonomi. Hal ini disebabkan pemerintah pada waktu itu dihadapkan pada permasalahan kekurangan modal sehingga pemerintah memberikan insentif kepada pemilik capital swasta atau pengusaha berupa kepercayaan mau bekerjasama dengan pemerintah.

Peran negara pada masa itu sangat penting dalam menumbuhkan borjuasi seperti yang dikemukakan oleh Barington Moore diatas. Pada masa itu modal, kontrak, konsesi, dan kredit dari negara diberikan secara langsung kepada pengusaha, namun pada kesempatan yang sama pengusaha-pengusaha swasta itu telah menjalankan atau memanfaatkannya. Pengusaha-pengusaha jenis ini dengan dukungan dibawah proteksi rezim pemerintah; mereka mempunyai patron dalam kelompok *seeking* yang mengakibatkan adanya ketidakadilan ekonomi.

Dewasa ini kesempatan itu telah masuk ke wilayah politik dengan terbuka lebar. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan, dengan daya pikat finansial yang besar, nominasi bisa dibeli agar mereka dicalonkan sebagai anggota legislatif. Berubahnya konstelasi politik dan ekonomi pasca-Soeharto membuat kekuasaan tersebar kemana-mana serta pengaruh politiknya yang luas. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin lebar dan berbiaya tinggi. Semakin banyak kelompok pengusaha mendekati pusat kekuasaan dengan cara menyuap, sehingga menimbulkan biaya transaksi keuntungan pemburuan rente dalam kekuasaan.

Dalam konteks kekinian, persyaratan itu semakin mendekati harapan karena beberapa alasan pokok yang mendasari fenomena itu sebagai berikut. Pertama, atmosfer politik di Indonesia didominasi ideologi pragmatisme yang mengakibatkan jagat perpolitikan nasional keruh dengan perebutan kepentingan politik. Kedua, hukum dan perundang-undangan masih merupakan produk politik kepentingan sempit dan sesaat. Ketiga, birokrasi yang korup dan parasitik telah menjadi medan pertarungan politik partai-partai politik untuk menjadi sarana

akses terhadap kekayaan negara. Keempat, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat masih sekadar broker politik yang memberlakukan politik sebagai dagangan yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan yang sangat subyektif. Kondisi ini dapat saja dimanfaatkan oleh pengusaha dalam pola permainan *rent* memaksimalkan kepentingan individual mereka.

Berbagai pengalaman menunjuk-kan secara empiris dan komparatif bahwa para pengusaha atau taipan di negara berkembang memanfaatkan kondisi itu, hanya untuk kepentingan sesaat. Dalam arti bahwa kebanyakan pengusaha dinegara berkembang terlibat dalam dunia politik dengan memanfaatkan kroni kapitalis. Pengusaha di negara berkembang bukan wirausaha-wirausaha sejati, tetapi pengusaha-pengusaha itu hanya menikmati rente dari penguasa setelah itu memberikan imbalan finansial serta dukungan politik bahkan kalau perlu memperoleh dukungan pengaruh dan kekuasaan.

mengemukakan bahwa konsep-konsep pokok mengenai politik adalah "negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policys beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)". Secara terurai, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa politik adalah "bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanaka tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan". Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*pubilc policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan

kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai baik, untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

Penjelasan yang lebih kurang sama, dikemukakan oleh Rush dan Althoff mengenai esensi dari politik. Menurutnya batasan mengenai politik bermacam-macam. Politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia: atau proses dimana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu: atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu', atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.

Namun demikian, menurut Rush dan Althoff, meskipun politik itu memiliki batasan yang bermacam-macam, akan sangat membantu apabila menganggap kekuasaan sebagai titik sentral dari studi politik dan beberapa pakar lainnya. Dengan demikian tampaknya kita menyepakati bahwa politik dibatasi sebagai "masalah kekuasaan", dan tentunya kita pun sepakat pula membatasi ilmu politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan".

Relasi Penguasa dan Pengusaha ini bukanlah soal baru dalam konteks akademisi, namun dalam kelamaan konsep ini di perbincangkan, ada saja hal-hal baru yang kemudian hadir, seakan menghangatkan kembali wacana lama ini, contoh kasus seperti di free port. Pemerintah memberikan izin usaha ke Investor asing untuk bagaimana kemudian sumber daya yang ada di Irian dapat di kelola atau di berdayakan, dalam hal ini mungkin Relasi ini kita bisa saja mengiakan



keadaannya namun jika kita melirik ke variabel lain yaitu masyarakat dalam artian dampak dari relasi penguasa dan pengusaha ini terhadap masyarakat yang tidak pernah merasakan kesejahteraan dari hasil usaha di bumi dimana mereka di lahirkan, jelas akan terbaca disana sebuah fenomena baru yang acap kali di kenal dengan istilah “Dominasi”.

Seperti apa yang telah di ilhami Antonio Gramscy melalui Teorinya tentang “Hegemoni” dikatakan disana bahwa adanya dua variabel yang berhubungan dan saling mendominasi, di satu sisi ada yang mendominasi dan di sisi lain ada yang di Dominasi.

Walaupun dalam Teori Gramscy lebih banyak membahas tentang Dominasi antar negara seperti yang di contohi oleh Nunikwidya, dimana Negara Athena dan Sparta mendominasi Negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993:73).

Dan bisa saja dalam kasus yang sama kita bisa gunakan teorinya Karlmax tentang Konsep Kapitalisme vs Sosialisme. Yang di mana kalangan Proletariat di jadikan alat pelanggeng Dominasi kelas Borjuasi, sehingga terciptanya kesenjangan antara Borjuasi dan Proletariat dan akibat dari kesenjangan ini melahirkan sebuah kondisi kritis yang dimana kalangan Proletariat bangkit dari ketertindasannya melawan kaum Borjuasi yang semena - mena atas mereka.

Reaksi dari kerja protes buruh atau Proletariat ini akan membawa mereka bergeser dari Habitus sebelumnya ke Habitus yang baru seperti yang di tegaskan oleh Jeans Bordeou dalam Teorinya tentang “Habitus”.

Di sini kosentrasi penulis adalah bagaimana kemudian dapat melakukan penelitian Tentang **“Relasi Penguasa Dan Pengusaha ( Kajian Sosiologi Politik**

**Masyarakat Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur )”**

Berbicara mengenai Relasi seperti yang tersebutkan di atas hemat saya adalah wajar dalam konteks kewajaran Relasinya dalam artian bilamana Relasi yang mereka bangun itu berdampak positif bagi masyarakat. Yang menjadi motif dari penelitian ini adalah berangkat dari sebuah analisis penulis secara awam akan informasi yang di sajikan oleh masyarakat, bahwasanya sebagian sektor penghasilan Masyarakat Kecamatan Sambi Rampas sudah terjual ke pihak pengusaha baik itu sektor pertanian ataupun perkebunan. Kemudian masyarakat di tekan untuk bekerja di pihak pengusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan besarnya gaji perhari 30-40 Ribu Rupiah.

Fakta di atas adalah faktor yang menarik semangat saya untuk segera mengusungkan Judul Proposal Penelitian ini, semoga melalui penelitian ini saya dapat berinteraksi langsung dengan Masyarakat Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur dan ikut andil dalam memenes skandal yang terancam menyubur.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola relasi yang di bangun penguasa dan pengusaha di kecamatan sambi rampas?
2. Bagaimana respon masyarakat atas relasi antara penguasa dan pengusaha di kecamatan sambi rampas?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Motif Relasi dari Penguasa dan Pengusaha yang dibangun secara seponitanitas di Kecamatan Sambi Rampas.

2. Untuk mengetahui dampak dari relasi penguasa dan pengusaha terhadap masyarakat kecamatan sambi rampas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pastilah mempunyai manfaat dan kegunaan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi Peneliti Manfaat dari penelitian ini adalah berangkat dari sebuah analisis penulis secara awam akan informasi yang di sajikan oleh masyarakat, bahwasanya sebageian sektor penghasilan Masyarakat Kecamatan Sambu Rampas sudah terjual ke pihak pengusaha baik itu sektor pertanian ataupun perkebunan.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat adalah masyarakat akan mengetahui peran, fungsi, dampak, penguasa dan pengusaha dalam kehidupan masyarakat. Dan penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian.

#### **E. Defenisi Operasional**

1. Pengertian Relasi,

- a. Relasi adalah Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau relation.
- b. Relasi adalah hubungan, perhubungan, pertalian, atau pelayanan.
- c. Relasi adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu yang memiliki hubungan interaksi satu sama lain yang menjadikan

kelompok itu saling mengenal satu sama lain dalam sebuah lingkungan kelompok manusia tersebut.

## 2. Pengertian penguasa.

Kekuasaan selalu ambigu, mempesona sekaligus menakutkan (Windhu, 1992). Mempesona karena berhadapan dengan seorang penguasa (raja, presiden, perdana menteri) yang berkharisma besar, berpenampilan memikat, dan dengan kharismanya itu, ia dapat mengatur dan mengendalikan chaos. Di lain pihak, menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas rakyat, merampas kebebasan dan kehidupan mereka. Kekuasaan ini sudah mutlak menjadi tujuan pada dirinya sendiri, tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1986), mengartikan kuasa sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu, kemudian kekuasaan berarti kuasa untuk mengurus atau memerintah.

## 3. Pengertian Pengusaha.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean (pajak), melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (pajak).

J.B. Say seorang ekonom Perancis pada awal abad 19 dihargai secara umum dengan mengenali bahwa seorang pengusaha dalam masyarakat kapitalis adalah sumbu dan semua hal berbalik. Definisi terkini mengenai seorang pengusaha adalah: Orang yang membentuk ulang atau mevolusir pola produksi dengan memanfaatkan suatu penemuan, secara lebih umum, sebuah kemungkinan teknologis yang belum pernah dicoba untuk menghasilkan suatu komoditi baru ataupun memproduksi suatu bentuk lama dengan cara baru.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Tinjauan Karya terdahulu**

Studi tentang relasi penguasa dan pengusaha sudah banyak diterbitkan dan ditemukan, namun sampai saat ini belum ada yang membahas tentang relasi penguasa dan pengusaha di kecamatan sambit rampas.

Adapun beberapa buku referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan relasi penguasa dan pengusaha adalah:

1. “Relasi Penguasa-Pengusaha Di Bumi Antasari” (Studi Kasus: Aktifitas Pertambangan Emas hitam di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan)[02/05/2002].  
Maulidya Widiart disini persamaannya adalah sama-sama membahas tentang relasi pengusaha dan penguasa, untuk selanjutnya adalah perbedaannya yang ada.
2. “Skandal Bank Sentury” dalam penelitian ini fokusnya adalah pada persoalan penguasa yang di perhambakan oleh pengusaha,(Anwar WMK, Kamis 15 April 2010).
3. Fera Hariani Nasution, dari skripsinya yang berjudul “relasi penguasa dan pengusaha dalam demokrasi Secara Langsung di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus: di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu”, dari

Universitas Sumatera Utara. Dalam skripsinya mengatakan dalam relasi itu yang menjadi determinan terpilihnya badan calon di tentukan oleh bisnismen atau pengusaha, dalam artian mereka yang memiliki modal banyaklah sebagai pengendali demokrasi.

4. Muhammad Sholeh Marsuki, dalam skripsinya berjudul relasi politik dan uang, menjelaskan bahwa yang menjadi ukuran rasional choice itu adalah uang yang di gunakan untuk membayar pemilih.

Dari beragam kajian pustaka diatas masih banyak pustaka yang belum disebut disini, terutama pustaka yang membahas tentang relasi penguasa dan pengusaha secara umum. Namun yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, kiranya cukup memadai, sungguh demikian pustaka yang disebut diatas jelas belum ada yang khusus membicarakan relasi penguasa dan pengusaha serta dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga penulis yakin bahwa skripsi yang akan dibahas ini belum ada duplikat dengan buku atau karya ilmiah lainnya. Namun tinjauan pustaka diatas penulis akan menjadikan bahan perbandingan dalam skripsi ini.

## **2. Pengertian Relasi.**

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau relation.

## **3. Penguasa menurut beberapa Ahli.**

- a. Menurut Galtung, *Pengertian kekuasaan* merupakan konsep yang paling dasar yang mendasari relasi- relasi sosial. Kekuasaan terjadi dalam pola - pola relasi antar manusia atau negara. Relasi kekuasaan yang tidak

seimbang, yang eksploitatif dan represif (Windhu, 1992). Konsep yang dipersoalkan oleh Galtung bukanlah segala macam kekuasaan, bukan pula kekuasaan politik dengan otoritasnya, tetapi kekuasaan yang dibangun dalam suatu relasi yang tidak seimbang. (Galtung (Windhu 1992).

- b. Menurut David (1981), seperti yang dikutip oleh Windhu (1992), *Definisi kekuasaan adalah* kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang lain, memaksa, dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri kebebasan dan memaksakan tindakan dengan cara- cara khusus. Sementara Dahrendorf (Wallace dan Wolf, 1986), mendefinisikan kekuasaan sebagai: “the probability that one actor with in a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance, regard less of the basis on which this probability rests”. Kekuasaan yang didapat oleh seseorang atau kelompok yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi kenyataannya kekuasaan tersebut malah digunakan untuk memuaskan tujuan sendiri.
- c. Kekuasaan selalu ambigu, mempesona sekaligus menakutkan (Windhu, 1992). Mempesona kerana berhadapan dengan seorang penguasa (raja, presiden, perdana menteri) yang berkharisma besar, berpenampilan memikat, dan dengan kharismanya itu, ia dapat mengatur dan mengendalikan chaos. Di lain pihak, menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas rakyat, merampas kebebasan dan kehidupan mereka. Kekuasaan ini sudah mutlak menjadi tujuan pada dirinya sendiri, tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai



tujuan-tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk kekuasaan tampak dalam pengaruh, kharisma, kepemimpinan atau wewenang, kekuasaan merupakan bagian setiap orang, entah sebagai orang tua, guru, buruh, warga negara, tetangga, rakyat, ataupun Presiden. Kekuasaan selalu ada di mana-mana, kekuasaan hadir disaat manusia melakukan interaksi sosial dengan sesama (Windhu, 1992).

- d. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1986), mengartikan kuasa sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu; kemudian kekuasaan berarti kuasa untuk mengurus atau memerintah; kemampuan; kesanggupan dan kekuatan.

Dalam bahasa Inggris, istilah *power* bersinonim dengan *force*, *energy*, *strength*, yang artinya secara umum adalah kemampuan untuk mengerahkan segala usaha guna mencapai tujuan. *Power* merupakan istilah yang paling umum dan sering diterjemahkan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Dan dalam konteks pembicaraan ini, *power* diterjemahkan sebagai kekuasaan karena keterkaitannya dengan dunia sosial dan politis.

#### **4. Pengertian pengusaha.**

1. Pengusaha adalah sosok orang yang mengambil keputusan dalam sebuah perpengusahaan yang akan memberikan banyak keuntungan banyak orang, dan sosok itu menjadi sebuah inti dari pengusaha yang terlibat dalam sebuah perpengusahaan.

2. pengusaha adalah penerapan sebuah inovasi dan juga kreatifitas dalam memecahkan masalah menjadi sebuah peluang besar yang akan memanfaatkan banyak peluang yang akan memberikan keuntungan untuk banyak orang yang terlibat dalam sebuah perpengusahaan.
3. pengusaha adalah orang yang mendirikan sebuah pengusaha dengan cara yang inovatif yang akan memberikan banyak keuntungan bagi banyak orang dan tentunya dan untuk orang yang menjalankan pengusaha.

## 5. Teori yang Relevan

- a. Mosca dalam karyanya *The Rulling Class* yang dikutip oleh Sastroatmodjo dalam *Perilaku Politik* (1995) menyatakan: “Dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelas penduduk. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama”.

Pandangan ini menekankan, bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas pertama yang menguasai fungsi politik, yakni *monopoli kekuasaan* sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama dengan cara- cara tertentu, (Sastroatmodjo,1995).

Mengenai konflik sosial, para ahli ilmu sosial memiliki pandangan dan penekanan yang berbeda. Setiap konflik yang terjadi antara kelas atau kelompok yang ada di masyarakat memiliki sebab dan akibat yang beragam. Ada yang dikarenakan oleh status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, dan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Hal ini dapat berakibat pada hancurnya suatu tatanan atau struktur sosial, terjadinya kekerasan, penindasan, dan bahkan peperangan.

- b. Karl Marx mendefinisikan kelas sebagai kelompok individu atau kelompok ke satuan sosial yang pada dasarnya bukan ditentukan semata - mata oleh tempatnya dalam proses produksi. Tetapi dari kedudukan ekonomi dapat juga ditentukan kelas sosialnya. Marx menyatakan bahwa penyebab penguasaan kelas tertentu terhadap kelas lainnya dikarenakan oleh hubungan produksi yang tidak seimbang (surplus value) dalam suatu hubungan produksi yang kapitalistik. Ekonomi politik merupakan penekanan khusus yang dibicarakan Marx dalam pertentangan ini. Marx menganggap perbincangan mengenai modal dan kerja, dan antara modal dan tanah perlu dijelaskan secara rinci, yang belum pernah disinggung dalam setiap perbincangan mengenai ekonomi dan politik (Giddens dan Held, ed., 1987).

Marx menjelaskan, bahwa semakin miskin keadaan pekerja atau tenaga kerja, semakin banyak kekayaan yang diproduksikannya. Semakin banyak kekayaan yang diproduksi, semakin besar pula

kekuasaan yang terbentuk dan semakin luas pula pengaruh kekuasaan tersebut. Pekerja menjadi komoditi murah. Semakin murah harga komoditi itu semakin banyak barang yang dihasilkannya. Devaluasi dunia manusia semakin membesar, hal mana berhubungan langsung dengan peningkatan nilai benda. Kerja tidak hanya menciptakan benda- benda, tetapi juga menciptakan kerja itu sendiri dan pekerja sebagai komoditi dalam proposisi yang sama dengan produksi barangbarang (Giddens dan Held, ed., 1987).

Lain halnya dengan Marx, para pengikut Marx (dikenal dengan kaum Marxis), menyatakan bahwa faktor ekonomi jelas mempunyai peranan yang menentukan terhadap cara produksi atau terhadap susunan sosial. Tetapi faktor yang bersifat politis dan ideologis (super struktur) juga mempunyai peranan yang penting. Kelas social ditentukan oleh tempatnya dalam kesatuan praktek- praktek sosial dalam arti menurut tempatnya dalam kesatuan pembagian kerja yang mencakup hubungan- hubungan politik dan ideologi. Tempat ini berhubungan dengan determinasi kultural dari kelas, yakni cara yang ditentukan oleh struktur (hubungan produksi, dominasi, politikideologi) yang berpengaruh terhadap praktek- praktek kelas (Giddens dan Held, ed., 1987).

Dalam *The Communist Manifesto* , Marx (Johnson, 1981) menyatakan: “Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang bebas dan budak, bangsawan

dan rakyat biasa, tuan dan hamba, pemimpin perusahaan dan orang luntang- lantang, dalam satu kata, penindas dan yang ditindas, selalu bertentangan satu sama lain, yang berlangsung tak putus - putusnya dalam suatu pertarungan yang kadang- kadang tersembunyi, kadang- kadang terbuka, suatu pertarungan yang setiap kali berakhir, baik dalam suatu rekonstitusi masyarakat pada umumnya secara revolusioner, maupun dalam keruntuhan umumnya dari kelas-kelas yang bercekcok tersebut". Pemilikan atau kontrol terhadap alat produksi merupakan dasar utama bagi kelas- kelas sosial dalam semua tipe masyarakat, dari masyarakat yang dibedakan menurut kelas yang paling awal sampai ke kapitalisme modern. Walaupun demikian, karakteristik dari kelas yang berbeda- beda dan sifat hubungan sosial diantara kelaskelas tersebut akan berbeda dalam masyarakat yang berbeda dan tahap yang berbeda pula.

Kelas penguasa adalah kelas yang mengeksploitasi dalam sistem hubungan produksi yang diajukan (terutama jika ada hubungan- hubungan produksi lain dalam masyarakat itu) melalui totalitas kadar dan bentuk intervensi negara dalam jangka waktu tertentu. Kelas penguasa tidak harus merupakan kelas dominan secara ekonomi dalam arti kelas yang mengeksploitasi menurut cara produksi yang dominan, di mana terdapat berbagai cara produksi, seperti: pertanian, subsistensi, feodalisme, kapitalisme, dan lain sebagainya (Giddens dan Held, ed., 1987).

Mengenai kelas atau kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Mosca (1939) menjelaskan, seperti yang dikutip dalam Soekanto (1984). Kelas pertama (berkuasa) biasanya terdiri dari orang-orang yang sedikit jumlahnya, menerapkan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dengan menikmati segala keuntungan dari kedudukan sebagai pemegang kekuasaan. Kelas yang kedua (dikuasai), terdiri dari lebih banyak orang, diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama, dengan cara-cara kurang lebih legal, sewenang-wenang atau dengan kekerasan. Kelas kedua tersebut menyediakan sarana untuk dapat hidup dan bertahan, serta hal-hal lainnya yang sangat penting bagi organisme politik.

Sementara Weber (Johnson, 1986), mengakui pentingnya stratifikasi ekonomi sebagai dasar yang fundamental untuk kelas, selain prestise dan kekuasaan politik. Kelas sosial terdiri dari semua mereka yang memiliki kesempatan hidup yang sama dalam bidang ekonomi. Weber menyatakan bahwa, jika ingin berbicara tentang suatu kelas, tidak mungkin terlepas dari pembicaraan tentang: 1) sejumlah orang yang sama – sama memiliki suatu komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan hidup mereka, 2) komponen ini secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi berupa pemilikan benda-benda dan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pendapatan, 3) hal itu terlihat dalam kondisi-kondisi komoditi atau pasar tenaga kerja.

Tidak seperti kelas ekonomi, kelompok (kelas) status berlandaskan pada ikatan subyektif antara para anggotanya, yang terikat menjadi satu karena gaya hidup yang sama, nilai serta kebiasaan yang sama, dan sering pula oleh perkawinan di dalam kelompok itu sendiri, serta oleh perasaan-perasaan akan jarak sosial dari kelompok-kelompok status lainnya. Mereka saling mengenal dan menyebut masing-masing sebagai “orang kita” dan berjuang mempertahankan perasaan superioritas terhadap mereka yang tidak termasuk dalam lingkaran (Johnson, 1986).

Selain posisi ekonomis dan kehormatan kelompok status, dasar yang lain untuk stratifikasi sosial adalah kekuasaan politik. Bagi Weber kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang meskipun mendapat tantangan dari orang lain. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan seseorang, khususnya dalam mempengaruhi perilaku. Kekuasaan tersebut digunakan terus-menerus untuk menanamkan suatu kepercayaan akan haknya untuk berbuat demikian, berusaha untuk menegakkan legitimasi kekuasaan sebagai batu loncatan bagi peningkatan posisi ekonomi atau status (Johnson, 1986).

Menurut kaum Marxis, kelas penguasa ketika berkuasa tidak mutlak membuat semua keputusan bagi masyarakat sebagai suatu unit yang kompak. Kekuasaan kelas penguasa dilaksanakan melalui seperangkat mekanisme yang secara obyektif saling berkaitan tetapi

tidak harus menyatu secara pribadi. Melalui cara ini, teknik eksploitasi yang ada direproduksi. Kelas penguasa bukanlah suatu subyek kekuasaan yang bersatu. Kekuasaan diwujudkan dalam suatu proses sosial yang obyektif, yang memelihara dan memperluas cara produksi tertentu serta dijamin oleh pemerintah atau negara (Giddens dan Held, ed., 1987).

Negara, menurut Offe dan Range, tidak memajukan kepentingan tertentu dan tidak beraliansi dengan kelas tertentu. Sebaliknya, yang dilindungi dan dimajukan oleh negara adalah seperangkat peraturan dan hubungan sosial yang dianggap tercakup dalam kekuasaan kelas kapitalis. Negara tidak membela kepentingan satu kelas tertentu, tetapi kepentingan bersama semua anggota masyarakat kelas kapitalis, yang disebut sebagai alat kekuasaan (Suhelmi, 2001; Johnson, 1986; Giddens dan Held, ed., 1987).

Marx membagi fungsi negara atas tiga bagian (Patria dan Arief, 2003). Pertama, negara adalah alat untuk menjamin kedudukan kelas atas, yang fungsinya secara politik meredam usaha-usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan kelas atas. Sedangkan pandangan moral, filsafat, hukum, agama, estetika, berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu (Magnis - Suseno, 1992). Kedua, negara merupakan ekspresi politik dari suatu struktur kelas yang melekat dalam produksi. Artinya, sebagai masyarakat yang terdiri dari kelas, negara adalah ekspresi politik dari



kelas dominan itu, yang dikenal dengan istilah borjuis. Ketiga, negara dalam masyarakat borjuis merupakan senjata represif dari kaum borjuis, negara adalah aparatus kekerasan dari kelas dominan untuk menjaga pertentangan kelas.

- c. Gramsci (Patria dan Arief, 2003), ia menyatakan bahwa kelas social akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara, yaitu: melalui cara dominasi (dominio) atau paksaan (coercion) dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral, yang disebut dengan hegemoni. Hegemoni merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari jiwa ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Upaya untuk menggiring individu agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan, sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus dengan mekanisme institusi yang ada di masyarakat. Perlu untuk diingat, bahwa Gramsci (Patria dan Arief, 2003) beranggapan hegemoni bukan hanya kepemimpinan intelektual dan moral saja tanpa diikuti praktek dominasi atau paksaan. Akan tetapi dapat terjadi sebagai kepemimpinan intelektual dan moral sekaligus diiringi dengan praktek dominasi atau paksaan.

Dominasi diartikan sebagai penguasaan, penempatan posisi bagus dan kuat; pengaruh besar (Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-

barry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya). Berasal dari bahasa Yunani kuno disebut eugemonia, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi negara- negara kota secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena terhadap negara kota lainnya (Franz Magnis- Suseno, 2003, dalam bayangan Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka, Gramedia, Jakarta).

Dalam upaya memisahkan negara (political society) dan masyarakat sipil (civil society), Gramsci (Patria dan arief, 2003) memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni. Kesemuanya itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisasi hegemoni. Ketiga batasan tersebut adalah: ekonomi, negara (political society), dan masyarakat sipil (civil society).

Ekonomi sebagai konseptualisasi yang pertama, merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan social produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas- kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi. Kedua, batasan negara, merupakan batas yang berarti tempat munculnya praktek- praktek kekerasan (polisi dan aparat lainnya) dan tempat terjadinya pendirian birokrasi negara.

Batasan ketiga, yaitu masyarakat sipil, batasan yang merujuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Bagi Gramsci (Patria dan Arief, 2003)

ketiganya harus memiliki demarkasi yang jelas. Meskipun demikian, ditingkat analisis dan empiris sering terjadi beberapa bagian organisasi dan institusi mungkin berada dalam sebuah batas, dua batas, bahkan tiga batas. Gramsci mengidentifikasikan birokrasi sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan, dan institusi pendidikan (Patria dan arief, Antonio Gramsci, 2003, Negara dan Hegemoni, Pustaka Pelajar, Yogyakarta).

Dalam pemahaman sempit, negara identik dengan pemerintahan, aparat kediktatoran kelas dengan pemaksaan dan fungsi-fungsi ekonomi. Kelas dominasi melaksanakan aparat negara, dalam pemahaman klasik, seperti pasukan, polisi, administrasi, dan birokrasi. Tetapi pemaksaan fungsi ini tidak dapat dipisahkan dari peraturan adaptasi dan edukasi negara, salah satunya berupaya untuk mencapai kelayakan yang memadai antara aparat produksi dan moralitas umum dari masyarakat (Patria dan Arief, 2003).

## **B. Kerangka Pikir.**

Penelitian ini bertujuan mengungkap bentuk relasi antar penguasa dan pengusaha, Salah satu cara untuk membaca situasi perilaku penguasa dalam memaksimalkan keuntungannya adalah dengan melakukan pendekatan *the New Political Economy* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Rational Choice*. Asumsi dasar yang dibangun dalam pendekatan ini adalah bahwa manusia adalah makhluk yang egois dan rasional. Sifat ini akan membuat manusia untuk selalu berusaha secara rasional dapat dilaksanakan dan akan membantu tercapainya kepentingan tersebut. Pada intinya manusia akan berusaha untuk sebisa mungkin mendapatkan keuntungan yang optimal dengan memanfaatkan segala fasilitas dan kemampuan yang ia miliki dengan segala keterbatasan atau kendala yang ada.

Cabang lain dari ilmu kontemporer teori pilihan negara, bermula dengan pandangan bahwa para agen dalam organisasi sektor baik swasta maupun negara akan mempunyai agenda-agenda yang sangat berbeda dari agenda-agenda para principal mereka. Para pelayan publik tidak berbeda dari setiap agen ekonomi lain dalam usaha akan diarahkan untuk bertindak dalam kepentingan publik luas, meski dalam kenyataannya perilaku mereka secara empiris lebih dapat dijelaskan lewat motif-motif kepentingan pribadi yang lebih sempit. Perilaku para pejabat negara dapat dipengaruhi oleh suap, kampanye sumbangan hadiah kepada anggota keluarga, atau janji masa depan. Sejumlah besar aktivitas sektor swasta dengan demikian diselewengkan dari kewirausahaan menghasilkan kekayaan ke pemburuan rente (*Krueger 1974; Buchanan, Tullock, dkk, 1980*).

Memang tidak semua pengusaha yang berpolitik berdampak negatif. Namun pengalaman empirik di negara berkembang menunjukkan, kemungkinan tabiat koruptif dari dwifungsi itu justru semakin membesar. Karena umumnya, motivasi utama para pengusaha atau 'taipan' berpolitik guna mempertahankan kepentingan bisnisnya.

Tracking yang dilakukan menunjukkan, pebisnis di negara berkembang yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan entrepreneur sejati. 'Kerajaan' bisnis yang dibangun bukan hasil persaingan usaha sehat dan inovasi bisnis, tetapi dari *privilege* dan konsesi yang diberikan patron politik. Yashiro Kunio (1990) menamakannya "kapitalis semu" (*ersatz kapitalism*), yaitu pengusaha yang tumbuh karena memiliki hubungan mesra dengan rezim.

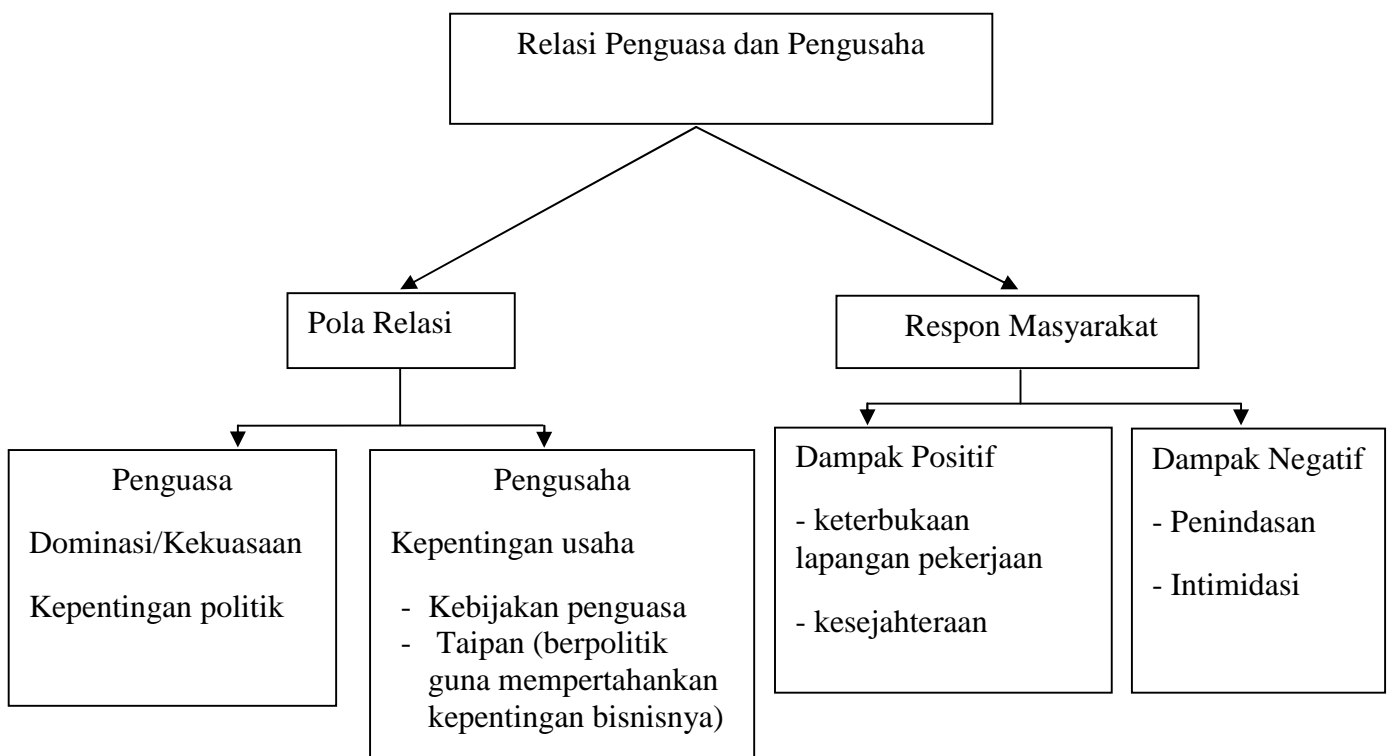
Bila kita kutip dari pemikiran gramsci, dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas semua nilai kehidupan yang pada akhirnya akan berubah menjadi sebuah doktrin bagi kelompok masyarakat lain dan secara sadar kelompok yang di dominasi mengikuti doktrin tersebut. penguasa diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tsb. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan - tindakan pihak - pihak lainnya.

Hakikat kekuasaan dapat terwujud dalam hubungan yang simetris dan asimetris. Hubungan Simetris berkaitan dengan hubungan persahabatan,

hubungan sehari-hari dan hubungan yang bersifat ambivalen. Kemudian hubungan asimetris berkaitan dengan popularitas, peniruan, mengikuti perintah, tunduk pada pemimpin formal atau informal, dll. Dalam kenyataan terdapat lebih banyak hubungan asimetris daripada hubungan simetris, oleh karena hubungan simetris merupakan tujuan ideal yang jarang tercapai.

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini, :

### Bagan Kerangka Pikir



**Gambar : 2.1 Skema Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud untuk mendapatkan kebenaran. Penelitian ada dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007: 6). Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti tidak menguji teori ataupun konsep, tetapi lebih memaparkan kondisi nyata berkaitan aktivitas sosial yang berada di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Dengan cara pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi.

#### **B. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu

penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur.

### **C. Informan Penelitian.**

Informan adalah seorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Informan yaitu yang berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu. Mengenai teknik pengambilan sampling, penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik mencakup orang – orang yang diseleksi atas dasar kriteria – kriteria tertentu yang dibuat peneliti, berdasarkan tujuan penelitian informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Informan yaitu yang berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu.

1. Mereka yang masih memiliki Relasi penguasa dan pengusaha.
2. Para pengusaha / pemuka Masyarakat
3. Staf pemerintah, melalui informan ini yang di jadikan sebagai obyek diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian.

Informan ini dapat di kategorikan menjadi tiga yakni, informan kunci, informan ahli, dan informan biasa. Penentuan informan yang akan di teliti lebih jauh, tidak di lakukan secara acak tetapi dilakukan secara *purposif*.



#### **D. Fokus Penelitian.**

Guna membatasi luasnya penelitian ini maka digunakan fokus penelitian. Setiap penelitian pasti memiliki orientasi teorinya sendiri yang berhubungan dengan pengetahuan sebelumnya ataupun berdasarkan pengalaman (Moleong, 2007: 78). Fokus dalam penelitian ini tentang Relasi Penguasa Dan Pengusaha (Kajian Sosiologi Politik Dalam Masyarakat Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur)

#### **E. Instrumen Penelitian.**

Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang menjadi instrumen utama (*key instrument*) atau *key instrument* yang dimaksud adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, maka peneliti mulai dari tahap awal penelitian sampai pada hasil peneliti, seluruhnya dilakukan oleh peneliti. Selain itu, untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, dokumentasi (kamera), *personal computer* (PC)

#### **F. Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan skunder. Dimana data primer adalah data yang didapatkan dari hasil survei atau wawancara. Sedangkan sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi. Sumber data terdiri sumber informan kunci, informan utama, informan tambahan.

## **G. Teknik Pengumpulan Data.**

### 1. Interview.

Suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Interview atau wawancara adalah langkah pertama sebelum melangkah ke metode observasi.

### 2. Observasi.

Suatu cara yang digunakan untuk mengamati dan mencatat obyek yang akan diteliti. Karena dengan observasi dapat kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dari metode lain. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan jenis observasi atau pengamatan tanpa partisipasi pengamat, jadi pengamat sebagai non partisipan.

### 3. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasasti, notulen rapat, lengger, agenda dsb (Arikunto, 2006 : 231). Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data – data yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan catatan – catatan yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

## H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menjelaskan analisis data dengan melaksanakan analisis data. Menurut Miles dan Huberman data yang diperoleh dari laporan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaktif. Langkah – langkah model interaktif meliputi empat aktifitas antara lain:

1. Pengumpulan data.

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. Pencatatan data diperlukan terhadap berbagai jenis dan data berbagai bentuk data yang ada dilapangan serta melakukan pencatatan dilapangan.

2. Reduksi data (*data reduction*).

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data – data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data (*data display*).

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom – kolom dalam sebuah data matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimaksudkan dalam kotak - kotak matriks.

#### 4. Verifikasi/kesimpulan.

Yaitu suatu tindakan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat di tinjau sebagaimana yang ditimbul dari data yang harus di uji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya (Miles Dan Huberman, 1994: 15-19).

### **I. Teknik keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena tanpa keabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka akan sulit seorang peneliti untuk mempertanggung jaabkan hasil penelitiannya. Dalam hal pengabsahan data peneliti menggunakan metode teriangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

#### 1. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, angket dan partisifatif.

#### 2. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia. Karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi, peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

### 3. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kecamatan Dan Kondisi Geografis**

##### **1. Letak Kecamatan Sambi Rampas**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sambi Rampas. Kecamatan Sambi Rampas terletak di pulau flores, salah satu dari sembilan kecamatan yang ada di kabupaten manggarai timur provinsi nusa tenggara timur (NTT). Kecamatan sambi rampas meliputi 6 kelurahan dan 14 desa luas wilayahnya mencapai 400,09 km<sup>2</sup> dan berjarak 5000 KM dari Ibu Kota Kabupaten Manggarai Timur. Adapun batas wilayah kecamatan sambi rampas.

- a. Sebelah Utara Berbatasan Laut Flores.
- b. Sebelah Barat Berbatasan kecamatan lamba leda dan poco ranaka timur.
- c. Sebelah Selatan Berbatasan kecamatan kumba.
- d. Sebelah Timur Berbatasan elar dan elar selatan.

##### **2. Topografi**

Kondisi topografi kecamatan sambi rampas adalah termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian 20 m s/d 22 meter diatas permukaan laut, kemiringan 3° - 8° dan berada pada posisi 5°. 15'. 54. 15'' lintan selatan bujur timur dan 119°. 27'. 43, 36'' bujur timur. Kondisi tanah di kecamatan sambi rampas terdiri dari tiga jenis yaitu tanah yang berstruktur batuan dan berwarna merah yang terletak di ujung timur batas

kecamatan elar yang berbatasan langsung dengan elar selatan. Wilayah ini merupakan wilayah bukit sekitar 7 Ha dengan kedalaman solum sekitar 0 cm - 25 cm, kedua tanah berwarna coklat keputihan, liat dan gembur yang merupakan tanah pada persawahan yang masih subur dengan solum yang dalam. Yang ketiga tanah yang berwarna hitam berstruktur agak berpasir, tanah ini sebagian besar merupakan tanah pada wilayah ladang sekitar 25 Ha dengan solum yang dalam. Pada tanah berwarna hitam tersebut cocok untuk tanaman jangka panjang tetapi tanaman sayuran dan padi sangat kerdil.

### **3. Luas Dan Pemanfaatan Lahan**

Luas wilayah untuk kecamatan sambi rampas sebesar 369,57 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain – lain. luas lahan yang diperuntukan fasilitas umum adalah sebagai berikut : luas tanah untuk jalan 17,50 Ha, luas lahan untuk pemukiman 22,02 Ha, untuk bangunan umum 5,58 Ha, luas lahan untuk irigasi 3,15 Ha, areal pemakaman 0,72 Ha, luas tanah untuk pertanian 3,17 Ha, luas tanah untuk usaha batu merah 3,50 Ha, luas tanah untuk lapangan sepak bola 1,20 Ha.

### **4. Iklim dan Curah Hujan**

Secara umum di kecamatan sambi rampas beriklim tropis dimana suhu udara mencapai rata – rata 25° C-30°C sepanjang tahun dan memiliki dua tipe musim yaitu musim hujan yang berlangsung antara bulan oktober

sampai bulan april dan musim kemarau antara bulan mei sampai bulan september. Curah hujan mencapai rata – rata 2000 mm - 3000 mm pertahun dan tertinggi terjadi pada bulan desember, januari dan februari.

## **5. Hidrologi dan Tata Air**

Menyangkut hidrologi kecamatan sambi rampas terdiri dari dua bagian yaitu untuk pertanian dan kebutuhan keluarga masyarakat. Sebagai sumber pengairan untuk pertanian dan peternakan kecamatan sambi rampas melalui aliran irigasi primer kampili dan 95% lahan pertanian memanfaatkan air irigasi tersebut. Selain itu ada lima lokasi bekas tambang galian golongan C yang dapat menjadi sumber air untuk pompanisasi. Apabila air irigasi kurang maka dapat memanfaatkan sumur bor atau sumur gali untuk kebutuhan air rumah tangga masyarakat 90% kk telah memiliki sumur sendiri baik dalam bentuk sumur gali maupun sumur bor dengan menggunakan timba manual atau mesin pompa air listrik. Kondisi air tanah di kecamatan sambi rampas sangat bersih karena bersumber dari tekstur tanah berpasir kasar bercampur kerkil dengan kedalaman rata – rata 2 – 3 meter.

## **6. Perekonomian Masyarakat**

Perekonomian masyarakat kecamatan sambi rampas sanga bervariasi tergantung dari kondisi kapasias yang dimiliki warga antar lain : tingkat pendidikan, keterampilan, kepemilikan tanah dan lain – lain. Dalam beberapa tahun terakhir kehidupan perekonomian masyarakat menunjukan suatu pertumbuhan yang signifikan atau perubahan yang sangat dirasakan.



Hal tersebut terlihat dari semakin banyak nya masyarakat yang mampu melakukan ibadah haji, perumahan, kendaraan yang semakin memadai.

Jenis mata pencarian warga masyarakat kecamatan sambi rampas dapat diklarifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wira usaha, pensiunan, buruh bangunan.

### **B. Sistem Kebudayaan Masyarakat**

Sistem peralatan hidup masyarakat kecamatan sambi rampas salah satunya bisa disimpulkan yaitu teknologi dimana teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang – barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat di gunakan mencapai untuk banyak hal. Di kecamatan sambi rampas hampir semua masyarakat menggunakan teknologi seperti Hand phone, laptop, computer, kulkas, kendaraan bermotor, dll. Meski begitu tidak semua memilikinya namun sudah dominan masyarakat sudah memilikinya.

### **C. Sistem Mata Pencaharian**

mata pencaharian masyarakat sambi rampas mengandalkan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi kecamatan sambi rampas. Pemanfaatan potensi alam secara mandiri memungkinkan manfaat ekonomi dapat terserap penuh untuk kecamatan dan

kemudian menjadi bagian pembiayaan bagi kecamatan itu sendiri, disamping itu pula kecamatan Sambi Rampas memiliki lahan pertanian yang sangat potensial maka seharusnya pemanfaatan lahan pertanian untuk pengembangannya namun tetap mengandalkan pengelolaan oleh rakyat setempat.

#### **D. Sistem Kemasyarakatan Dan Keekerabatan**

Dalam kehidupan keluarga orang yang berperan sebagai kepala keluarga suami atau anak laki – laki. Dilihat dari sisi sistem kemasyarakatan masih kuat dengan rasa kekeluargaan yang masih kuat dan pemerintahan sudah belajar dengan baik.

#### **E. Sistem Religi Atau Kepercayaan**

Mayoritas masyarakat kecamatan Sambi Rampas beragama Islam, adapun masyarakat yang memiliki kepercayaan dinamisme atau kekuatan supra natural serta kebiasaan menyediakan sesajian dengan kemenyang, telur dan uang. Hal ini sudah jarang kita dapatkan di kecamatan Sambi Rampas karena modernisasi telah masuk hingga pelosok desa sehingga dapat mengubah pola pikir anak – anak untuk tidak ketinggalan dalam menjalani persaingan hidup ini. Namun dilihat pada agama yang di anut oleh masyarakat kecamatan Sambi Rampas 100% menganut agama Islam.

#### **F. Sistem Bahasa Masyarakat**

Mayoritas penduduk masyarakat kecamatan Sambi Rampas masih menggunakan bahasa daerah. Meskipun ada sebagian masyarakat atau penduduk

setempat yang menggunakan bahasa Indonesia namun kebanyakan masyarakat masih menggunakan bahasa daerah.

### **G. Sistem Kesenian Masyarakat**

Budaya merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat, serta kemampuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan tradisi memiliki peran sangat penting pula dalam budaya masyarakat. Dalam bahasa Latin kata tradisi berasal dari kata *traditio* yang berarti “diteruskan atau kebiasaan”. Sedangkan dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi yang baik akan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat yang bersangkutan. Hal yang paling mendasar dari sebuah tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun secara lisan sehingga dari sinilah tradisi maupun budaya itu tetap ada tengah – tengah masyarakat. Tradisi yang masih berkembang di Kecamatan Sambi Rampas sebagai warisan budaya adalah musyawara adat, upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara adat kelahiran, upacara adat dalam bercocok tanam, tradisi ini lah yang bertahan hingga sekarang.

### **H. Sistem Pengetahuan Masyarakat**

Sistem pengetahuan masyarakat Kecamatan Sambi Rampas beragam sebagian masyarakat ada yang pendidikan tinggi sampai/sarjana, hanya hanya

sekolah sampai SD, bahkan ada yang tidak tamat SD, ada juga yang sampai SMP bahkan ada yang tidak tamat SMP, ada juga yang hanya sampai SMA bahkan tidak tamat SMA bahkan ada yang tidak sama sekali menginjak jenjang pendidikan dan buta huruf. Meskipun fasilitas sekolah sudah lengkap misalnya TK, SD, SMP, SMA dan sekolah tinggi namun banyak faktor yang mendasari seperti faktor ekonomi, faktor kemalasan, dan faktor banyaknya pernikahan mudah dikalangan remaja.

## **BAB V**

### **POLA RELASI PENGUASA DAN PENGUSAHA**

#### **A. Pola Relasi Penguasa**

##### **1. Dominasi / Kekuasaan.**

Dinamika Kekuasaan di Kecamatan Sambu Rampas tidak pernah sepi dari problema relasi penguasa-pengusaha. Pada zaman otoritarianisme Orde Baru, penguasa sedemikian rupa mengondisikan agar jejaring kekuasaan menjadi tempat bergantung kalangan pengusaha. Maju mundurnya korporasi-korporasi skala besar diupayakan sedemikian rupa sejalan dengan ambisi memperkaya diri kalangan para pejabat. Itulah mengapa, hampir tidak ada usaha-usaha korporasi skala besar yang steril dari pengaruh politik penguasa. Perusahaan-perusahaan transnasional pun hanya mungkin mendapatkan ruang untuk menggulirkan direct investment pada berbagai lapangan ekonomi yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara, yakni manakala telah menjalin joint venture dengan pengusaha lokal. Sementara, pengusaha lokal dimaksud tak lain dan tak bukan adalah aktor ekonomi yang berkolaborasi dengan jejaring kekuasaan.

Becermin pada realitas tersebut tak berlebihan jika kemudian dikatakan, bahwa pengusaha menjadi subordinat penguasa. Langsung maupun tak langsung, tercipta hubungan tuan dan hamba. Penguasa berkedudukan sebagai tuan, dan pengusaha sebagai hamba. Jika penguasa tampil sebagai super-ordinat, pengusaha terpilin sebagai sub-ordinat. Begitu seriusnya persoalan ini, berbagai tipologi kekuasaan dalam Kecamatan Sambu Rampas berlomba menjadi super-ordinat

demi mengawal relasi penguasa-pengusaha. Bukan saja pejabat penentu kebijakan ekonomi yang terus dipertuan oleh kalangan pengusaha, tetapi juga penjabat-pejabat dalam bidang hukum. Tak mengherankan jika sukses seorang pengusaha di zaman Orde Baru ikut pula ditentukan oleh gradasi hubungan dengan pejabat Polri, Kejaksaan Agung dan dengan aparat hukum pada umumnya.

Terutama setelah Orde Baru berlalu, muncul kesimpulan umum tentang sesuatu yang sesungguhnya memalukan sebagai Kecamatan Sambu Rampas. Bahwa relasi penguasa-pengusaha yang sedemikian rupa itu merefleksikan timbulnya abnormalitas pada keseluruhan jaringan hubungan antara politik dan perekonomian. Kenyataan ini lalu melahirkan ambiguitas. Pada satu sisi, tetap berlaku aksioma tentang gerak maju perekonomian nasional yang membutuhkan daya dukung politik. Politik tetap dipersepsi sebagai variabel pendorong timbulnya kemajuan ekonomi. Terlebih lagi tatkala perekonomian nasional kian terseret ke dalam pusaran globalisasi, makin terasa urgensi daya dukung politik. Melalui visi industrial yang kompetitif, politik memberi arah pada perekonomian agar bergerak di jalur yang semestinya.

Pola tuan-hamba yang mendistorsi tentang relasi penguasa-pengusaha telah mengondisikan timbulnya kemajuan-kemajuan semu dalam perekonomian nasional. Bukan saja demoralisasi mewarnai sepak terjang kalangan pengusaha, lebih dari itu tercipta situasi non-creating value.

Tetapi pada lain sisi, pola tuan-hamba yang mendistorsi rentang relasi penguasa-pengusaha telah mengondisikan timbulnya kemajuan-kemajuan semu

dalam perekonomian nasional. Bukan saja demoralisasi mewarnai sepak terjang kalangan pengusaha, lebih dari itu tercipta situasi non-creating value. Kenikmatan yang dirasakan oleh para pengusaha berbanding terbalik dengan kemampuan menghasilkan produk-produk unggulan yang diperhitungkan di kancan internasional. Perekonomian nasional lalu disesaki oleh kehadiran para aktor yang sepenuhnya berorientasi profit, namun abai terhadap misi profetik mewujudkan keunggulan kompetitif. Meminjam perspektif humanis Mohandas Gandhi tentang dosa dunia (sins in the world), itulah realisme wealth without work. Pertanyaan yang kemudian menarik dikedepankan, bagaimana perkembangan setelah berlalunya (the passing away) kekuasaan rezim Orde Baru.

Pola Relasi Penguas - Pengusaha pada era pasca-Orde Baru, Pelan tapi pasti, terkuak ke permukaan bahwa terjadi perubahan pola Relasi Penguasa - Pengusaha. Tidak seperti pada era Orde Baru, kalangan Pengusaha pada akhirnya mempertontonkan kemampuan untuk menemukan keseimbangan baru dalam merajut relasi dengan penguasa. Bahkan, mulai muncul fakta - fakta mengejutkan di mana para pengusaha mulai berupaya untuk mengeser pola relasi. Para pengusaha mulai berakrobat untuk menemukan suatu cara merebut posisi super-ordinat. Sebagai konsekuensinya, para penguasa diskenariokan sedemikian rupa sebagai subordinat. Dengan kata lain, telah terjadi upaya pembalikan posisi dalam relasi penguasa-pengusaha.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Syirajudin selaku Kepala kecamatan Pengusaha biasanya memberikan dukungan kepada penguasa yang sedang berkonsentrasi pada pemenangan politik. Setelah memenangi pertarungan

politik, maka penguasa bersangkutan melakukan tindakan balas budi kepada pengusaha antara lain melalui pemberian kebijakan perizinan investasi, serta pemberian kebijakan proyek yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut ini pertanyaan yang di kemukakan oleh bapak Ismail selaku pemuka masyarakat :

yang melatar belakangi sehingga adanya bergesernya relasi penguasa terhadap pengusaha, Pola relasi pengusaha dengan penguasa dalam atmosfer politik, bermula dari pengusaha yang memberikan dukungan kepada penguasa yang berkontestasi pada pemenangan politik dan berakhir dengan dukungan kepada pemenang pada saat berkuasa.

(Wawancara 07 Agustus 2017).

Paling tidak, ada dua contoh soal yang menggambarkan adanya pergeseran relasi penguasa-pengusaha. Pertama, terkuaknya tindakan seorang pengusaha bernama Abdul Rasid dalam sebuah proses peradilan di parkara. Realitas yang terungkap di sini adalah determinasi yang dirancang oleh seorang pengusaha secara faktual justru menentukan arah dan opsi keputusan para pejabat KecamatanSambi Rampas dalam bidang hukum. Dengan kekuatan uang, pengusaha benar-benar didaya mendikte penguasa. Pada titik ini muncul gejala yang membahayakan proses tata kelola Kecamatan Sambi Rampas: penguasa telah menghamba kepada pengusaha.

Kedua, pengusaha tampil sebagai kekuatan koreksi terhadap penguasa. Dalam konteks perseteruan Abdul rasyd versus Syahidun, misalnya, berkenaan dengan skandal cek – cok urusan tanah kita menyaksikan timbulnya perubahan



pola relasi penguasa-pengusaha. Melalui upaya koreksi, pengusaha membangun kekuatan kritis terhadap penguasa. Namun, inilah upaya koreksi yang diwarnai oleh begitu banyak pamrih. Kekuatan politik yang berada di bawah pengaruh Abdul Rasyd didayagunakan sedemikian rupa untuk mempertontonkan keterlibatan Syahidun dalam skandal cek – cok urusan tanah. Mau tidak mau, Syahidun goyah posisinya sebagai orang terpercaya di suatu wilayah itu.

yang dapat digaris bawahi ialah munculnya titik balik dalam relasi penguasa-pengusaha. Dalam konteks Abdul rasid, kita menyaksikan kerapuhan penguasa bidang hukum. Penguasa begitu mudahnya dibeli untuk memuluskan kepentingan pengusaha. Tanpa bisa dielakkan, pengusaha menjadi elemen pokok terus berkecamuknya mafia peradilan di Indonesia. Dalam konteks Abdul Rasid, kita menyimak timbulnya upaya koreksi kalangan pengusaha terhadap penguasa penentu kebijakan ekonomi. Masalahnya, upaya koreksi ini tak berpijak pada obyektivitas. Dengan sendirinya, upaya koreksi ini bukanlah pilar penentu tegaknya rasionalitas dalam kebijakan ekonomi. Semua arus balik ini tak memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Berikut ini pendapat yang di kemukakan oleh bapak Supratman selaku sekretaris kecamatan

yang menjadi tanggapan pemerintah terhadap pola relasi penguasa dan pengusaha, pola relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer ekonomi politik adalah penguasa membalas budi melalui pemberian kebijakan perizinan investasi, pemberian kebijakan proyek yang sumber dananya dari APBD. Pengusaha yang bermain di sektor wacana ini adalah pengusaha yang memiliki modal besar yang mampu menggerakkan usaha, galian dan mineral,

(Wawancara 09 Agustus 2017).

Birokrasi di Kecamatan Sambu Rampas selalu diwarnai dengan adanya campur tangan penguasa dengan pengusaha. Dimana patologi ini akan menyebabkan penyelewengan terhadap kebijakan politik, yang tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat, melainkan mementingkan para pengusaha dan para penguasa itu sendiri. Ciri khas korupsi di Kecamatan Sambu Rampas, antara lain bersifat integralistik, yaitu dipraktekkan begitu menyatu antara penguasa dan pengusaha. Penguasa yang berkolusi dengan pengusaha tidak saja di tingkat rendahan dan menengah, tetapi terutama sekali di tingkat atas.

Sosialisasi umum Muhamad Saban tentang “Kebijakan Publik dan Etika Publik” pada 10 Agustus 2017 menunjukkan hal itu. Konflik kepentingan, kata dia, banyak terjadi dalam pembuatan kebijakan, terutama yang berimplikasi pada anggaran, bisa belanja atau insentif. Pejabat yang berlatar belakang pengusaha sering tidak risih ikut dalam pemutusan kebijakan tersebut. Meski dia mengaku sudah meninggalkan bisnisnya, di belakangnya ada keluarga atau teman-temannya yang berharap dari kue kebijakan tersebut.

Dengan kekuatan uang, pengusaha seperti memiliki senjata ampuh untuk menekan pemerintah atau parlemen. Kedua institusi negara tersebut bahkan seperti tersandera oleh kekuatan uang, dan menafikan kekuatan suara rakyat yang telah memilihnya. Pemerintah merasa perlu membentuk Komite Ekonomi Nasional (KEN) untuk menampung suara pengusaha agar untuk melakukan kajian ekonomi nasional, regional, maupun global. Padahal di pemerintahan ada Bappenas dan Badan Kebijakan Fiskal yang bertugas merancang kebijakan pembangunan nasional.

(Staff pemerintah, 10 Agustus 2017).

## **2. Kepentingan Politik.**

Beragam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai wakil negara hingga kini masih menunjukkan ketidak berpihakan kepada rakyat. Tindakan, pilihan, strategi, atau keputusan terkait ekonomi yang seharusnya untuk kebaikan bersama, kini telah disalahgunakan untuk kesejahteraan segelintir orang. Sehingga, kebijakan tersebut menjadi remeh-temeh, tidak memprioritaskan kepentingan rakyat.

Kongkalikong antara pelaku ekonomi dan aktor politik serta penguasa tak luput telah melahirkan tatanan ekonomi yang hanya menguntungkan kepentingan diri dan kelompok, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat banyak. Inilah banalitas kebijakan ekonomi yang masih mengganggu kemajuan bangsa Indonesia yang musti mendapat perhatian serius dari kita semua.

Contoh kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat banyak bisa dilihat dari hasil penelitian “Hubungan Negara dan Pengusaha di Era Reformasi. Studi Kasus: Bisnis Grup Bakrie (2004-2012)”. Dia mengatakan, kelompok Bisnis Bakrie dibuktikan telah mempengaruhi kebijakan negara setidaknya dalam dua kasus. Pertama, persoalan divestasi saham. Kasus kedua, jual beli tanah dll.

Pada kasus pertama, pengusaha mempergunakan pemerintah daerah sebagai instrumen kekuasaan untuk membeli saham divestasi dengan harga yang

lebih murah dibanding dengan harga pasar dan mendapat hak pertama untuk membeli.

Pada kasus kedua, pemerintah daerah melepaskan tanggung jawab dalam menangani dampak jual beli pada pemerintah. Pengusaha mempergunakan instrumen politik negara melalui kebijakan Penguasa berupa UU yang berlaku agar melakukan kebijakan yang tidak merugikan pengusaha. Dan pembenaran atas kebijakan Penguasa ini dikuatkan oleh Badan pengawas, pengadilan, hingga kepolisian.

Menurut saya, proses pengambilan keputusan negara hingga kini masih menjadi permainan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pengusaha. Proyek-proyek siluman yang melibatkan anggota DPR dan pemilik perusahaan besar yang belakangan ini banyak disorot media massa adalah satu contoh. Dalam kondisi tersebut, hubungan negara dan pengusaha lebih mementingkan bisnis, ketimbang kepentingan rakyat. Akibat fatalnya, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak terurus.

Tampaknya, reformasi politik yang digelorakan anak-anak bangsa beberapa tahun yang lalu, belum menghadirkan reformasi ekonomi yang berkeadilan bagi semua kalangan dan pihak. Pengerukan sumber-sumber daya ekonomi, misalnya pertambangan minyak dan gas (migas) oleh pelaku bisnis atau investor asing kini semakin menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi konflik sosial. Ini semakin sempurna manakala para penguasa negeri ini ikut “mengamini” dengan memberikan keistimewaan berupa peraturan atau undang-

undang. Di sinilah kita menyaksikan absennya negara dalam upaya mensejahterahkan rakyat.

Persoalan hubungan pengusaha dan penguasa yang tidak banyak menguntungkan masyarakat kecil ini sebenarnya sudah diawali sejak era Orde Baru. Penguasa sedemikian rupa mengondisikan jejaring kekuasaan (the web of power) menjadi tempat bergantung kalangan pengusaha. Dan pada kenyataannya, di era reformasi justru relasi itu semakin lengket, mesra, dan semakin mengakar.

Padahal, perkawinan antara pengusaha dan penguasa akan melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada pengusaha. Pengusaha akan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Bahkan, mereka rela mengeluarkan dana besar untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan agar kepentingan mereka terakomodasi dengan modus-modus yang canggih, bahkan bisa menjurus manipulatif.

## **B. Pola Relasi Pengusaha.**

### **1. Kepentingan Usaha**

#### **a. Kebijakan Pengusaha.**

Hubungan bisnis dengan politik merupakan hubungan yang sangat erat kaitannya dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Politik akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk perjalanan bisnis. Situasi politik yang tidak stabil akan mengakibatkan perekonomian yang merosot sehingga memiliki dampak besar terhadap bisnis yang sedang dijalani.

Maka dari itu jika akan melakukan sebuah bisnis maka seharusnya memiliki kepekaan dan pengetahuan terhadap politik yang sedang terjadi sehingga anda mampu untuk membaca dan memprediksi perkembangan bisnis yang akan terjadi dimasa yang akan datang sehingga anda harus mempersiapkan strategibisnis yang terbaik untuk mengatasinya. Apalagi bisnis yang anda jalani merupakan bisnis lintas negara yang sedang mengalami konflik politik, anda harus bersiap siap jika sesuatu hal pecah yang mengakibatkan sebuah konflik yang sangat besar yang akan berdampak negative pada bisnis anda seperti konflik perang, konflik pemboikotan atas sebuah produk tertentu, atau perubahan kebijakan pemerintah dan konflik politik lainnya yang mungkin akan mengakibatkan dampak negative dan kerugian terhadap bisnis anda. Karena politik yang berlaku disuatu Negara akan mempengaruhi lingkungan perekonomian atau kinerja bisnis yang mungkin akan memanas.

Permasalahan politik yang ada juga akan berpengaruh terhadap bisnis bisnis yang kecil hingga menengah. Bisnis bisnis dengan level menengah kebawah akan merasakan dampak dari politik yang ada, makanya harus mengetahui perubahan apa yang akan terjadi dari sebuah politik pemerintahan atau sebuah kebijakan pemerintahan, apakah mendukung atau bahkan merugikan. Anda harus menyadarinya dan harus selalu mencari informasi politik terutama yang akan mempengaruhi untuk bisnis anda sehingga anda tidak terkena resiko yang akan ditimbulkan dari dampak politik yang tidak bersahabat dengan bisnis yang anda jalani. Karena hubungan bisnis dengan politik merupakan sesuatu yang bisa berjalan dengan saling berdampingan untuk mencapai sebuah tujuan sesuai

dengan rencana bisnis dan rencana politik untuk menghasilkan sebuah perekonomian yang lebih baik, tapi hubungan bisnis dengan politik juga akan berjalan dengan saling berlawanan yang mengakibatkan terjadi ketidaksepahaman sehingga menimbulkan dampak negative dari salah satu bidang, baik itu dampak negatif bagi bidang politik atau dampak negatif bagi perjalanan bisnis.

Ada beberapa aspek lingkungan politik yang harus ketahui dan harus pertimbangkan ketika melakukan bisnis yaitu :

### **1. Stabilitas Pemerintahan.**

Stabilitas pemerintahan akan sangat penting untuk sebuah bisnis, karena masa depan bisnis akan bergantung pada politik yang sedang berlangsung. Ketidakstabilan politik akan membuat kesulitan untuk menjalankan sebuahbisnis, sebuah perubahan politik yang mendadak akan mengakibatkan kehilangan modal dan kerugian yang besar dan risiko kehilangan bisnis yang besar.

### **2. Hubungan Internasional.**

Hubungan suatu pemerintahan antara negara yang satu dengan yang lainnya tidak selalu stabil, bisa saja terjadi keburukan situasi politik yang akan mengakibatkan dampak terutama bagi anda yang melakukan bisnis online.

Biasanya dampak politik yang tidak baik terhadap bisnis online berada pada proses pembayaran yang tidak berjalan dengan sempurna karena kebanyakan proses pembayaran di bisnis online menggunakan Paypal atau dengan Click bank sehingga akan berakibat berkurangnya penjualan bagi

Negara Negara tertentu yang sedang mengalami konflik politik karena proses pembayaran yang mengalami hambatan.

### **3. Birokrasi Pemerintahan.**

Lingkungan politik seperti ini akan menghambat sebuah bisnis yang dibangun secara lintas negara. Investor dan pengusaha asing akan mengalami kesulitan untuk membuka bisnis karena pemerintahan setempat akan mencegah untuk tumbuhnya perusahaan asing yang potensial untuk tumbuh disuatu negara.

Sebagai kesimpulan hubungan bisnis dengan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat untuk sebuah keharmonisan sebuah perekonomian. Perlu adanya kestabilan yang saling mendukung antara sebuah kebijakan politik dan perjalanan bisnis yang sedang dijalani. Dan anda sebagai pelaku bisnis harus menjaga diri agar tetap siaga untuk berbagai kemungkinan yang terjadi sehingga anda telah mempersiapkan segala hal yang diakibatkan oleh konflik politik yang terjadi. Perubahan politik akan menciptakan peluang positif dan negative tergantung pada bisnis yang anda jalani dan memanfaatkan situasi yang ada.

#### **b. Taipan (Berpolitik guna Mempertahankan kepentingan Bisnisnya).**

Dampak sosial hadirnya sejumlah pengusaha di kecamatan Sambi rampas membuat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yaitu pro dan kontra sementara itu terkooptasinya aparat pemerintah daerah khusus kecamatan Sambi rampas dan ketua adat oleh kepentingan pengusaha, membuat masyarakat seolah-olah tidak memiliki perlindungan dan tidak pernah merasakan adanya



kepemimpinan di tengah masyarakat. Dengan belum berkembangnya pendidikan di daerah ini, membuat kontrol dari kalangan akademisi terhadap kinerja pemerintah daerah masih lemah. Diharap menjadi pelindung dan melakukan tindakan advokasi berasal dari sejumlah pegiat sosial dan lingkungan yang tergabung dalam beberapa LSM. keberadaan partai politik semestinya berfungsi sebagai menampung aspirasi masyarakat belum dapat di harap banyak. Partai politik tampak nya belum dapat mengangkat isu lingkungan dan proses marjinalisasi masyarakat lokal sebagai isu yang menarik mereka lebih suka berburu kekuasaan sambil menebar sejuta harapan dari pada membela kepentingan rakyat. Sebaliknya yang terjadi justru mereka berkolusi dengan pengusaha dan penguasa. Kuat dugaan bahwa maraknya aktivitas perambahan jual beli tanah kecamatan sambi rampas melibatkan pengusaha dan penguasa dan elit lokal. Dampak sosial hadirnya sejumlah pengusaha di kecamatan sambi rampas membuat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yaitu pro dan kontra semntara itu terkooptasinya aparat pemerintah daerah khusus kecamatan sambi rampas dan ketua adat oleh kepentingan pengusaha, membuat masyarakat seolah-olah tidak memiliki perlindungan dan tidak pernah merasakan adanya kepemimpinan di tengah masyarakat. Dengan belum berkembangnya pendidikan di daerah ini, membuat kontrol dari kalangan akademisi terhadap kinerja pemerintah daerah masih lemah. Diharap menjadi pelindung dan melakukan tindakan advokasi berasal dari sejumlah pegiat sosial dan lingkungan yang tergabung dalam beberapa LSM.

keberadaan partai politik semestinya berfungsi sebagai menampung aspirasi masyarakat belum dapat di harap banyak. Partai politik tampak nya belum dapat mengangkat isu lingkungan dan proses marginalisasi masyarakat lokal sebagai isu yang menarik mereka lebih suka berburu kekuasaan sambil menebar sejuta harapan dari pada membela kepentingan rakyat. Sebaliknya yang terjadi justru mereka berkolusi dengan pengusaha dan penguasa. Kuat dugaan bahwa maraknya aktivitas perambahan jual beli tanah kecamatan sambi rampas melibatkan pengusaha dan penguasa dan elit lokal.

## **BAB VI**

### **RESPON MASYARAKAT ATAS RELASI PENGUSAHA DAN PENGUSAHA**

#### **A. Dampak Positif.**

##### **a. Keterbukaan Lapangan Pekerjaan.**

Kalau di lihat keadaannya, kondisi ekonomi Kecamatan Sambi Rampas dari dulu memang sangat lemah. Penguasa bertindak terlalu arogan, terlalu banyak kebohongan. Penciptaan aturan – aturan semuanya bagus - bagus, tapi sayangnya itu hanya diatas kertas saja. Kenyataan dalam pelaksanaan kacau balau. Terlalu banyak kolusi, korupsi.

Menurut masyarakat Kecamatan Sambi Rampas yaitu bapak muhammad sa'ban keadaan perekonomian di kecamatan sambi rampas saling tuding. Dan yang lebih sial lagi penguasa mengeluarkan jurus pamungkas nya "sara". Menurutnya, kita tidak boleh Mengkambing hitam kan keturunan Cina sebagai penyebab dari keadaan perekonomian indonesia, karena bukan mereka yang berkuasa. Tapi yang saya heran kenapa yang disalahkan mereka. Apakah masyarakat Kecamatan Sambi Rampas sudah begitu bodohnya untuk tidak mau melihat kenyataan.

(Wawancara 10 Agustus 2017)

Menurut bapak faisal tidak ada istilahnya Penguasa minta izin ke Pengusaha untuk Berkuasa. Tapi yang ada Pengusaha minta izin ke Penguasa (pejabat yang terkait) untuk "Berusaha"( membuka usaha ).Kalau keadaan sudah terjadi seperti ini, seharusnya yang membuat aturan-aturan yang harus bertanggung jawab ( siapa lagi kalau bukan penguasa ).

Menurut bapak Samsin terdapat dua relasi politik ( kekuasaan ) dan bisnis ( pengusaha ) yaitu :

1. Relasi berbasis kepentingan
  - a. Di Kecamatan Sambu Rampas, relasi antara pengusaha dan penguasa dilandasi kepentingan dan dalam banyak konteks tidak ada hubungan yang permanen
  - b. Relasi dibangun oleh pelaku usaha dengan pejabat melalui dukungan finansial ataupun fasilitas di saat kampanye
2. Hubungan Transaksional
  - a. Hubungan antara pejabat dan pelaku usaha tidak setara, dan sering kali pengusaha dimanfaatkan oleh pejabat
  - b. Hubungan sifatnya lebih transaksional
  - c. Pejabat mendapatkan keuntungan dari dukungan finansial dalam kemenangan pilkada
  - d. Pengusaha mendapatkan keuntungan proyek - proyek pembangunan dan hak konsesilahan

Yang menarik dari konteks di Kecamatan Sambu Rampas, ketika sudah menjabat yang terjadi seringkali pengusaha merasa di dimanfaatkan oleh pejabat, politik di Kecamatan Sambu Rampas lebih independen dan tidak bisa diatur oleh pelaku bisnis. Aktor politik dalam kasus ini seakan – akan meninggalkan pelaku bisnis sendirian tidak ada sebuah proteksi, ini yang membedakan dengan pola relasi di zaman orde baru, dimana pengusaha memiliki proteksi yang sangat kuat oleh rezim Suharto. Proteksi alat negara terhadap kepentingan pengusaha sangat kuat, contoh Freeport zaman Soeharto mungkin tidak ada demo besar – besaran karena akan ada batalion yang turun. Pola relasi sekarang, pengusaha tidak bisa

mengharapkan proteksi yang besar terhadap relasinya. Saya bisa menggambarkan yang saya temukan di Kecamatan Sambi Rampas kira – kira seperti itu.

#### **b. Kesejahteraan.**

Salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat madani adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Jadi, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan di tangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi bermakna semakin spesifik lagi yaitu fungsi-fungsi kekuasaan politik merupakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kepentingan rakyat. Konsep demokrasi memberi keyakinan bahwa unsur-unsur rakyat senantiasa menjadi faktor utama yang dilibatkan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi mendapat sambutan yang luar biasa di dalam hati sanubari rakyat karena demokrasi lebih berpihak kepada rakyat. Dengan demokrasi, rakyat boleh berharap bahwa masa depannya ditentukan oleh dan untuk rakyat, sedangkan demokratisasi ialah proses menuju demokrasi. Tujuan demokratisasi pendidikan ialah menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis dan sangat toleran dengan pandangan dan praktik-praktik demokrasi.

Generasi penerus sebagai anggota masyarakat harus benar-benar disiapkan untuk membangun masyarakat madani yang dicita-citakan. Masyarakat dan generasi muda yang mampu membangun masyarakat madani dapat dipersiapkan melalui pendidikan. Senada dengan pendapat Hartono tersebut, menyatakan

bahwa salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat madani adalah melalui jalur pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Generasi penerus merupakan anggota masyarakat madani di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali cara-cara berdemokrasi melalui demokratisasi pendidikan. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, turut bertanggung jawab (*melu angrungkebi*), terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki (*melu handarbeni*), sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya (*padhasarasa*), dan mempelajari kehidupan masyarakat. Kelak jika generasi penerus ini menjadi pemimpin bangsa, maka demokratisasi pendidikan yang telah dialaminya akan mengajarkan kepadanya bahwa seseorang penguasa tidak boleh terserabut dari budaya dan rakyatnya, pemimpin harus senantiasa mengadakan kontak dengan rakyatnya, mengenal dan peka terhadap tuntutan hati nurani rakyatnya, suka dan duka bersama, menghilangkan kesedihan dan penderitaan-penderitaan atas kerugian-kerugian yang dialami rakyatnya. Pernyataan ini mendukung pendapat Suwardi (1999: 66) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan yang selalu mengandalkan kekuasaan pendidik, tanpa memperhatikan pluralisme subjek didik, sudah saatnya harus diinovasi agar tercipta masyarakat madani. Upaya ke arah ini dapat ditempuh melalui demokratisasi pendidikan.

## **B. Dampak Negatif.**

### **Penindasan / Intimidasi.**

Dalam demokrasi, secara prinsip suara atau kehendak mayoritas rakyat adalah perwakilan suara Tuhan. Apa yang diinginkan oleh rakyat betapapun itu radikal berbeda dengan kenyataan, negara- dalam hal ini pemerintah- harus mewujudkannya, karena pemerintah adalah pelayan atau pesuruh rakyat. Kekuasaan politik dalam demokrasi dibagi menjadi tiga pelaksana yang sering disebut sebagai Trias Politika, yaitu: kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara teoretis, ketiga lembaga kekuasaan ini bersifat independen dan berinteraksi untuk cross-check and balance dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan rakyat.

Namun pada kenyataannya (De Facto), dalam sebuah negara demokrasi ada unsur lain penentu jalannya sebuah negara, yaitu pemilik modal. Pemilik modal ini bisa bertingkat mulai dari yang memiliki modal yang relatif kecil, sampai yang memiliki modal yang masif. Sering tampak, semakin masif modal yang dimiliki, maka akan semakin besar potensi pengaruh pemilik modal terhadap pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, pemilik modal bisa menjadi besar, juga sering karena difasilitasi oleh pemerintah berupa akses ke modal, kontrak kerja, dan perlakuan khusus yang lain. Celaknya, dalam demokrasi pergantian tampuk pimpinan politik adalah sebuah keniscayaan, namun pemilik modal akan tetap bertahan dan berusaha dengan segenap tenaga untuk tetap hidup dan untung.

Usaha untuk bertahan hidup dan menciptakan lingkungan usaha yang menguntungkan, akan mendorong pemilik modal untuk melakukan segala cara

untuk mempengaruhi kebijakan dan perundang-undangan. Bagaimana mereka melakukannya?

Pemilik modal membuka pintu masuk ke kekuasaan dimulai saat kampanye pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota legislatif. Kampanye pemilihan ini merupakan proses yang mahal dengan segala macam keperluan logistik dan ongkos untuk pergerakan roda partai pendukung. Pemilik modal yang pintar biasanya memberikan dukungan modal yang besar kepada calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi, meski tidak jarang mereka mendukung logistik semua calon dengan jumlah yang berbeda untuk cari aman. Cara lain untuk mendapat akses ke kekuasaan adalah pemilik modal sendiri turun langsung di gelanggang politik praktis sebagai politisi dengan membuat atau bergabung dengan partai politik. Maka jangan heran, jika begitu banyak pengusaha baik kecil maupun konglomerat menjadi politisi, karena dengan demikian, keamanan modal dan usaha mereka bisa lebih terjamin.

Dengan sistem demokrasilah, terjadilah oligarki simbiosis penguasa dan pengusaha menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Sesungguhnya simbiosis ini tidak melulu bersifat negatif, hanya saja kalau dilandasi oleh motif menguasai ekonomi dan bukan untuk kepentingan rakyat banyak, maka akan melahirkan rejim yang timpang dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Banyak ahli politik yang berpendapat bahwa dalam sebuah demokrasi yang sehat, diperlukan kebebasan pers dan institusi masyarakat sipil berupa organisasi massa yang bersih dari kepentingan politik. Kedua lembaga non-pemerintah ini diharapkan bisa menjadi pengontrol kekuasaan agar tetap dijalurnya memperjuangkan rakyat



kebanyakan. Namun fakta menunjukkan, banyak pers dan media juga dimiliki oleh pemilik modal yang menyebabkan mereka menjadi bias dan berpihak sesuai dengan tujuan pemiliknya. Organisasi massa meski bersifat lebih independen, sering pula ikut menjadi pendukung kekuasaan. Organisasi yang kritis terhadap penguasa bisa menghadapi kebijakan diktatorial yang bermaksud membungkam mereka secara konstitusional. Jadi harapan rakyat akan bertumpu ke mana?

Rakyat mungkin bisa berharap banyak kepada kaum intelektual yang idealis dan agamawan yang ikhlas yang menjauh atau terpinggirkan dari kekuasaan karena idealisme dan keikhlasan mereka. Meski mereka lemah dalam tataran praktis memberi kesejahteraan material kepada rakyat, namun mereka bisa memberi kesejahteraan bentuk lain berupa pikiran dan qalbu yang bahagia karena dekat dengan kebenaran dan Tuhan. Namun tak bisa dipungkiri, kadang perut yang lapar bisa merubah pikiran dan qalbu yang bahagia menjadi pribadi yang lepas kendali dan mudah membuat kerusakan

## **BAB VII**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Sambu Rampas Tahun 2017 Tentang Relasi Penguasa dan Pengusaha (kajian sosiologi politik dalam masyarakat Sambu Rampas, maka akan penulis sajikan kesimpulannya. Adapun kesimpulannya menunjukkan bahwa.

1. Pola relasi penguasa dan pengusaha di Kecamatan Sambu Rampas yang sedemikian rupa merefleksikan timbulnya abnormalitas pada keseluruhan jaringan hubungan antara politik (penguasa) dan perekonomian (pengusaha). Kenyataan ini lalu melahirkan ambiguitas. Pada satu sisi, tetap berlaku aksioma tentang gerak maju perekonomian nasional yang membutuhkan daya dukung politik (penguasa). Politik (penguasa) tetap dipersepsi sebagai variabel pendorong timbulnya kemajuan ekonomi (pengusaha).
2. Respon Masyarakat Rakyat mungkin bisa berharap banyak kepada kaum intelektual yang idealis dan agamawan yang ikhlas yang menjauh atau terpinggirkan dari kekuasaan karena idealisme dan keikhlasan mereka. Meski mereka lemah dalam tataran praktis memberi kesejahteraan material kepada rakyat, namun mereka bisa memberi kesejahteraan bentuk lain berupa pikiran dan qalbu yang bahagia karena dekat dengan kebenaran dan Tuhan. Namun tak bisa dipungkiri, kadang perut yang lapar bisa merubah pikiran dan qalbu

yang bahagia menjadi pribadi yang lepas kendali dan mudah membuat kerusakan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Penguasa dan Pengusaha harus tetap bekerjasama dalam melihat potensi yang ada di Kecamatan Sambu Rampas. Kalau di lihat keadaannya, kondisi ekonomi Kecamatan Sambu Rampas dari dulu memang sangat lemah. Penguasa bertindak terlalu arogan, terlalu banyak kebohongan. Penciptaan aturan-aturan semuanya bagus-bagus, tapi sayang itu hanya di atas kertas saja. Kenyataan dalam pelaksanaan kacau balau. Terlalu banyak kolusi, korupsi.
2. Pengusaha, Dan tidak kalah penting nya di harapkan kepada pemerintah Kecamatan Sambu Rampas Mempunyai tujuan yang sama baik itu membangun Daerah Kecamatan Sambu Rampas memberikan apa yang dibutuhkan oleh Daerah Kecamatan Sambu Rampas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A pozzolini *pijar-pijar penelitian, gramsci perjuangan kelas kontemporer*.
- Donny Adian, Gahral, *percik Pemikiran Kntemporer*, (Yogyakarta: Jalasutra. 2006).
- Fashri, Fauzi, *Penyingkapan Kuasa Simbol:Aproprisi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2007).
- George, Sorensen, (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Giddens, Antonio dan David Held, ed., (1987), *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik* , Rajawali Pers, Jakarta
- Hendri . J. Schmandt, (2002). *Filsafat Politik (Terjemahan Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno sampai zaman Modern)*, Ahmad Baidlowi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metode Penelitiann Kualitatif*. Bandung :  
RemajaPosdaKarya.
- Patria Nezar, (1999) *Antonio gramsci Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta, (1986), *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ritzer George douglas j. goodman. *Teori sosiologi “dari teori klasik sampai perkembangan mutakhir teori social postmoderen”*. Kreasi Wacana.
- R.Vedi, Hadiz, (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta, LP3ES.
- Santoso, Yudi, (2003). *Diskursus Niccolo Machiavelli. Terjemahan: the discourses the modern library, New York*, Yogyakarta: Bentang Budaya.

Soerkanto, Soerjono dan Agus Brotosusilo. R.A. Schermerhorn (1986) *Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta : Rajawali.

Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan “*pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*” Bandung : Alfabeta

Yahya, Muhaimin, (1988) *Kebijaksanaan Ekonomi dan Klientelisme*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Yahya, Muhaimin, (1988) *Kebijaksanaan Ekonomi dan Klientelisme*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Yoshihara, Kunio, September, (1999), *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES

# **L A M P I R A N - L A M P I R A N**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana penguasa di Kecamatan Sambu Rampas?
2. Bagaimana pengusaha di Kecamatan Sambu Rampas?
3. Bagaimana pola relasi penguasa dan pengusaha di Kecamatan Sambu Rampas?
4. Bagaimana respon masyarakat tentang penguasa di Kecamatan Sambu Rampas?
5. Bagaimana respon masyarakat tentang pengusaha di Kecamatan Sambu Rampas?
6. Bagaimana respon masyarakat atas relasi penguasa pengusaha di Kecamatan Sambu Rampas?

# **D O K U M E N T A S I**





Gambar: Penyerahan Surat Izin Penelitian



Gambar: Pihak Penguasa Dan Pegusaha



Gambar : Wawancara Pak Camat

## RIWAYAT HIDUP



ALMULYADI, Lahir di Lengko Randang, Kab. Manggarai Timur (Flores, NTT) pada tanggal 28 Oktober 1995. Merupakan anak ke 1 dari pasangan Mursin dan Murfia Memulai pendidikan formal di SD Inpres Lengko Randang Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2001

dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTs.Negeri Pota, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 2 Sambu Rampas, kemudian tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama pula diterima pada Jurusan pendidikan Pendidikan Sosiologi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan melalui penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Masa pendidikannya dihabiskan dengan aktif di organisasi akan tetapi tidak membuatnya puas dengan hal itu. Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membahagiakan orang tua dengan melakukan yang terbaik hingga akhir hayatnya